

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori utama dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan merupakan teori yang berkembang dari pemikiran teori ekonomi neoklasik. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa hubungan keagenan suatu perusahaan timbul karena adanya kepercayaan perusahaan untuk dikelola oleh para manajer. Akan tetapi, para manajer yang diberikan kepercayaan tersebut tidak dapat diharapkan sepenuhnya menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kesepakatan yang timbul antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan dan investor (*principal*) dimana para manajer akan melakukan pengelolaan perusahaan atas nama pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan. Pernyataan tersebut menjelaskan adanya asumsi bahwa prinsipal dan agen sebagai orang atau

sekelompok orang yang sama-sama memiliki sifat rasional ekonomis yang termotivasi oleh kepentingan pribadi mereka.

Asumsi di atas diperkuat oleh Eisenhardt (1989). Dijelaskan bahwa teori keagenan dibangun berdasarkan beberapa asumsi (Tabel 1). Di antara asumsi-asumsi tersebut adalah asumsi perilaku, asumsi organisasional dan asumsi informasi. Asumsi tersebut menjelaskan timbulnya masalah dari proses kontrak antara prinsipal dan agen.

Tabel 2.1. Asumsi Pembangun Teori Keagenan

Keterangan	Pembahasan
Ide Kunci	Hubungan prinsipal dan agen harus mencerminkan organisasi informasi yang efektif dan biaya berbasis risiko
Unit Analisis	Kontrak antara prinsipal dan agen
Asumsi Perilaku	Kepentingan sendiri, Pembatasan rasionalisasi, Menghindari risiko
Asumsi Organisasional	Konflik sebagian tujuan di antara pesertanya, Efisiensi sebagai kriteria keefektifan, Asimetri informasi antara prinsipal dan agen
Asumsi Informasi	Informasi sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan
Masalah Proses Kontrak	Masalah keagenan (<i>moral hazard</i> dan <i>adverse selection</i>), Berbagi risiko
Bidang masalah	Hubungan di mana prinsipal dan agen secara parsial berbeda tujuan dan pilihan risiko: Kompensasi, Regulasi, Kepemimpinan, <i>Whistle-blowing</i> , Integrasi vertikal, Harga transfer

Sumber: Eisenhardt (1989). *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No.

1, hal. 59 diadaptasi dari Hadiprajitno (2013).

Hubungan keagenan tersebut dilihat berdasarkan struktur kepemilikan yang sahamnya dimiliki oleh publik atau menyebar. Dominasi saham yang dimiliki publik merupakan solusi dari masalah keagenan ini. Akan tetapi masih banyak perusahaan yang baik pemilik perusahaan maupun para manajer tidak dapat mengendalikan satu sama lain sehingga terjadi asimetri informasi antara mereka. Asimetri informasi inilah yang menimbulkan konflik keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).

Selain asimetri informasi yang terjadi. Teori keagenan dapat menjelaskan perusahaan sebagai pusat dari berbagai kontrak (*nexus of contracts*), yaitu perusahaan merupakan organisasi besar yang menerima banyak kontrak persetujuan yang terlibat dengan perusahaan. Banyaknya kontrak yang terlibat mengakibatkan perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya kontrak (*contracting cost*) yang timbul. Biaya kontrak tersebut adalah seperti biaya negosiasi, biaya pemantauan kinerja, biaya pemantau kebangkrutan atau biaya kegagalan kontrak. Biaya kontrak tersebut akan menimbulkan akun-akun baru dalam laporan keuangan. Pemilihan kebijakan akuntansi merupakan bentuk aktivitas manajer yang digunakan untuk meminimalkan biaya tersebut.

Kedua hal itulah yang menjadi dasar pemikiran bahwa struktur kepemilikan dan pemilihan kebijakan akuntansi akan mempengaruhi kualitas informasi laba yang dilaporkan. Givoly *et al.* (2010) menyebutkan bahwa pola dalam informasi laba yang terjadi dapat disebabkan dari faktor operasional pemilik perusahaan daripada konflik manajemen laba yang mengutamakan rasional ekonomis mereka sendiri.

2.1.2 Kualitas Laba

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa laba akuntansi diperoleh dari keuntungan kegiatan utama perusahaan ditambah dengan pendapatan lainnya dan dikurangi dengan biaya-biaya yang menurut perusahaan dapat diakui menjadi beban. Informasi tersebut diperoleh dengan melihat kinerja perusahaan pada laporan laba ruginya.

Suatu laporan laba rugi harus mencerminkan kinerja perusahaan dengan atau tanpa memiliki gangguan persepsi didalamnya. Gangguan tersebut dapat berasal dari kegiatan internal perusahaan yakni berupa pemilihan metode dan pengestimasi akuntansi yang dapat berdampak pada kualitas laba yang disajikan. Metode dan pengestimasi akuntansi tersebut sangat fleksibel sehingga kualitas laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi perusahaan dapat berbeda-beda (Wardhani, 2009).

2.1.2.1 Definisi Kualitas Laba

Kualitas laba dapat diartikan kedalam beberapa definisi. Schipper dan Vincent (2003) mengatakan bahwa kualitas laba adalah akurasi pelaporan laba perusahaan yang menggambarkan keadaan perubahan aset ekonomis perusahaan selain dari transaksi kepada pemilik. Sama halnya dengan Bellovary *et al.* (2005) mendefinisikan kualitas laba sebagai kemampuan laba dalam merefleksikan kebenaran laba perusahaan dan membantu memprediksi laba mendatang dengan mempertimbangkan stabilitas dan presistensi aktualnya.

Pengukuran kualitas laba merupakan kegiatan yang belum memiliki formula tetap sehingga pengukuran kualitas laba menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu yang dianggap sebagai formula yang paling mampu mengukur kualitas laba. Hal tersebut dibenarkan oleh Surifah (2010). Dia menyebutkan bahwa selama ini belum ada ukuran yang pasti atau tepat untuk mengukur seberapa besar kualitas laba dari suatu laporan keuangan perusahaan, yang terdapat hanya merupakan pendekatan yang digunakan untuk memproksi kualitas laba tersebut. Oleh karena itu mengacu pada pendekatan pengukuran kualitas laba yang dilakukan oleh Givoly *et al.* (2010) yang juga dilakukan oleh Wardhani (2009) penelitian ini menggunakan pengukuran multidimensional komprehensif.

Dimana pengukuran multidimensional tersebut menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Persistensi akrual, diukur berdasarkan pada perbedaan relatif persistensi akrual terhadap arus kas.

Pengukuran persistensi laba mengharapkan suatu laba yang berkualitas karena keberlanjutannya, dimana laba lebih bersifat tetap (*smooth*) dan tidak fluktuatif. Sebagai mekanisme pengukuran kualitas laba, persistensi akrual ditentukan dari manfaatnya dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penilaian ekuitas dengan mengamati nilai laba operasi tahun berjalan perusahaan dengan arus kasnya, sehingga laba yang berkualitas diharapkan dapat menggambarkan estimasi laba masa depan.

Dechow (1994) dalam Wardhani (2009) menjelaskan bahwa laba tahun berjalan secara umum akan menghasilkan prediksi yang lebih baik terhadap arus kas masa mendatang. Oleh karena itu, semakin besar asosiasi antara laba tahun berjalan dengan arus kas masa mendatang, diharapkan akan menunjukkan tingkat prediksi dari laba yang lebih tinggi.

2. Ketiadaan manajemen laba, diukur dengan *discretionary accruals* dari modifikasi Dechow *et al.* (1995) terhadap model Jones pada penelitian Givoly *et al.* (2010).

Pengukuran kualitas laba dengan menggunakan ketiadaan manajemen laba menjelaskan bahwa suatu laba harus memberikan informasi keuangan yang terbebas dari unsur bias. Kebiasaan suatu laba disebabkan karena dorongan yang timbul dari perilaku tidak sehat manajer (*moral hazard*) yang dapat merugikan perusahaan dan investor.

Ketiadaan manajemen laba dapat menjelaskan netralnya suatu laba.

Dimana laba yang netral adalah laba yang tidak dikelola untuk tujuan pihak tertentu (Wardhani 2009). Pengukuran laba dengan menggunakan model Jones merupakan model pengukuran akrual diskresioner yang diyakini paling baik dalam mengukur ketiadaan manajemen laba. Akrual diskresioner adalah akrual yang timbul karena adanya diskresi dari manajemen perusahaan sehingga dapat dianggap mencerminkan suatu tindakan pengelolaan laba (Wardhani 2009).

2.1.2.2 Kualitas Suatu Angka Laba

Suatu laba dikatakan berkualitas apabila laba tersebut relevan dan reliabel. Berdasarkan *Statements of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 2, relevannya suatu laba adalah kemampuan suatu angka laba untuk memberikan gambaran nilai prediksi, nilai umpan balik dan waktu yang tepat dalam penggunaan angka laba tersebut. Sedangkan nilai reliabel suatu laba dapat dikatakan sebagai suatu angka laba yang terbebas dari berbagai interferensi (netral) dan dapat ditelusuri, serta adanya kejujuran penyajian yang melekat pada angka laba tersebut.

Suatu angka laba akuntansi dapat diketahui dari laporan laba rugi per-periode suatu perusahaan. Di dalam laporan laba rugi tersebut, terdapat 3 buah angka laba yang disajikan, yakni: angka laba kotor, angka laba operasi dan angka laba bersih. Ketiga angka laba tersebut memiliki makna semantik dan sintatik dan juga pragmatik yang menjadikan angka laba akuntansi sebagai nilai yang dapat dijadikan sebagai alat ukur yang baik untuk mengukur kinerja perusahaan serta angka laba tersebut dapat digunakan untuk meramalkan aliran kas perusahaan (Febrianto dan Widiastuty, 2005).

Dari ketiga angka laba akuntansi tersebut timbul suatu pertanyaan angka laba akuntansi manakah yang lebih menjelaskan laba yang berkualitas. Dalam penelitian Febrianto dan Widiastuty (2005) dijelaskan bahwa angka laba akuntansi yang berkualitas adalah angka laba akuntansi yang dapat menjelaskan hasil pendapatan usaha perusahaan atau kinerja perusahaan yang benar-benar dapat menghasilkan pendapatan dalam periode tersebut. Dalam penelitiannya

mereka berkesimpulan bahwa angka laba kotorlah yang lebih memberikan gambaran kinerja perusahaan.

Namun terdapat kesimpulan lainnya, yang dijelaskan bahwa para peneliti laba perusahaan lainnya sering menggunakan laba operasi perusahaan sebagai suatu angka laba akuntansi yang dapat memberikan kualitas yang lebih baik. Febrianto dan Widiastuty (2005) menyarankan bahwa angka laba operasi dapat digunakan apabila angka tersebut dapat berhubungan langsung dengan proses penciptaan laba melalui biaya-biaya operasi, dimana setiap *item* biaya memang sebenarnya bertujuan untuk menciptakan pendapatan saja.

2.1.3 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki andil yang penting dalam mendeskripsikan tingkat kemampuan pengendalian yang terjadi dalam suatu perusahaan (Carolina dan Wardhani, 2011). Struktur kepemilikan merupakan komposisi kepemilikan pemegang saham yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan struktur kepemilikan tertentu akan membutuhkan pengawasan atau pemantauan tertentu, dimana perusahaan yang struktur kepemilikannya menyebar akan jauh lebih banyak pengawasannya daripada perusahaan yang struktur kepemilikannya terpusat atau terkonsentrasi. Dalam penelitian Sabrinna dan Adiwibowo (2010) dijelaskan bahwa struktur kepemilikan adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan.

Hanazaki dan Liu (2006) menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: perusahaan dengan struktur kepemilikan menyebar (*widely held*) dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (perusahaan keluarga, perusahaan milik pemerintah, perusahaan milik institusi keuangan dan perusahaan milik institusi non keuangan). Struktur kepemilikan *widely held* (kepemilikan menyebar) merupakan struktur kepemilikan yang paling banyak terdapat di negara Inggris dan Amerika serta Australia.

La Porta *et al.* (1999) menjelaskan dalam penelitiannya mengenai kepemilikan perusahaan di berbagai negara, menemukan bahwa hampir dari 27 negara kaya di dunia yang dijadikan sampel, banyak diantaranya memiliki kepemilikan saham yang tidak tersebar, terutama untuk wilayah negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Perusahaan yang terdapat di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara cenderung memiliki struktur kepemilikan keluarga dan manajerial ketimbang kepemilikan menyebar atau kepemilikan perusahaan yang mayoritas dimiliki publik.

2.1.3.1 Struktur Kepemilikan Keluarga

Penelitian Hanazaki dan Liu (2006) menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah Asia Tenggara memiliki perusahaan yang dikategorikan sebagai negara yang memiliki struktur kepemilikan keluarga yang banyak. Ward (1987) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan keluarga apabila terdapat dua atau lebih anggota keluarga merupakan pendiri perusahaan dan tim manajemen perusahaan, dengan kata lain anggota keluarga tersebut mempunyai pengaruh terhadap kebijakan

perusahaan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola serta dikontrol oleh keluarga baik keluarga inti (memiliki hubungan darah) atau karena ikatan pernikahan (Sugiharto, 2009).

Lei dan Song (2008) mengatakan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga cenderung memiliki *agency problem* yang minim. Hal ini dikarenakan fungsi perancangan dan pengambilan keputusan perusahaan diduduki oleh anggota keluarga sehingga *agency problem* dapat diefisiensikan. Akan tetapi penerapan tata kelola perusahaan dari perusahaan keluarga dinilai buruk, hal ini dikarenakan interpretasi keluarga untuk mengutamakan kepentingan keluarganya sehingga kepentingan perusahaan yang seharusnya menjadi prioritas menjadi tidak diperhatikan.

2.1.3.2 Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional secara mudah dapat disebutkan sebagai kepemilikan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh institusi. Institusi disini dapat berasal dari pemerintah umumnya dan lembaga lain khusus seperti lembaga keuangan, lembaga badan hukum dan lembaga dana perwalian (Shien *et al.*, 2006 dalam penelitian Sabrinna dan Adiwibowo, 2010). Suatu institusi adalah lembaga yang berkuasa dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi.

Di dalam penelitian Juniarti dan Agnes (2009) ditegaskan bahwa institusi yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki kemampuan dalam memonitori yang lebih baik daripada kepemilikan individu. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusi tidak mudah terpedaya dari tindakan manipulasi manajemen. Selain itu

institusi yang berinvestasi atau investor institusi memiliki peran sebagai fidusiari, yaitu memiliki insentif yang lebih besar untuk memantau tindakan manajemen dan kebijakan perusahaan.

Struktur kepemilikan institusional suatu perusahaan mendorong peningkatan pengawasan kinerja manajemen, semakin besar investasi institusi semakin besar dorongan pengawasan, sehingga optimalisasi kinerja manajer akan secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan dalam hal ini kualitas laba yang dimiliki oleh perusahaan. Peran pengawasan institusi sangat penting karena dapat mengurangi konflik keagenan, namun sebaliknya pengawasan yang umumnya dilakukan institusi memiliki biaya keagenan yang lebih besar dari pada struktur kepemilikan yang lain.

2.1.3.3 Struktur Kepemilikan Manajerial

Telah disinggung di atas bahwa struktur kepemilikan manajerial merupakan isu yang timbul dalam teori keagenan yang dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976). Terdapat dua pendekatan yang harus diketahui dalam melihat struktur kepemilikan manajerial, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan informasi.

Dalam pendekatan keagenan struktur kepemilikan manajerial dianggap sebagai metode kepemilikan perusahaan yang dapat mengurangi konflik keagenan yang timbul di dalam perusahaan, sedangkan pendekatan ketidakseimbangan informasi menganggap bahwa struktur kepemilikan manajerial dapat meminimalisasi kesenjangan informasi antara pihak internal perusahaan

(manajer) dan pihak eksternal perusahaan (investor). Struktur kepemilikan ini mengharuskan para manajer yang mengelola perusahaan juga memiliki penyertaan modal dalam perusahaan tersebut. Keadaan seperti ini dapat memotivasi mereka para manajer dalam memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahaan yang berimbas pada meningkatnya kinerja perusahaan.

Meningkatnya kinerja perusahaan dapat dilihat dari meningkatnya laba perusahaan yang semakin berkualitas. Semakin besarnya kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan yang mereka kelola semakin besar pula kualitas laba perusahaan. Manajer akan lebih bijak dalam memilih dan melaksanakan kebijakan perusahaan, selain akan menguntungkan mereka secara langsung juga berdampak pada tercapainya tujuan perusahaan.

2.1.4 Manfaat *Corporate Governance Perception Index*

Di negara Indonesia sudah terdapat regulasi yang mengharuskan perusahaan menerapkan *corporate governance*. Perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti dan menjalankan *corporate governance* sebagai bentuk mentaati regulasi pemerintah Indonesia ataupun sebagai kebutuhan yang sudah mereka perlukan. Keikutsertaan mereka dalam *corporate governance* perlu ditunjang dengan suatu pengakuan yang menyatakan bahwa mereka telah menerapkan *corporate governance* secara baik dan benar. CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) merupakan salah satunya. CGPI sebagai salah satu upaya untuk melakukan evaluasi dan mengukur kualitas penerapan *corporate governance* perusahaan. Selain itu terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh perusahaan dalam mengikuti CGPI antara lain (www.iicg.org):

1. Pembetulan faktor-faktor internal organisasi yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG (*Good Corporate Governance*).
2. Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan GCG, khususnya berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang diperlukan.
3. Peningkatan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dan seluruh *stakeholders* terhadap urgensi dan manfaat GCG dalam pengelolaan risiko ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kepercayaan investor dan publik.
5. Penggunaan hasil CGPI sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG.
6. Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota perusahaan untuk menerapkan GCG.
7. Penataan organisasi perusahaan yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG.
8. Peningkatan kesadaran dan komitmen bersama dari internal perusahaan dan *stakeholders* terhadap penerapan GCG.

Indeks persepsi *corporate governance* merupakan hasil dari CGPI yang menggambarkan sejauhmana kualitas penerapan *corporate governance* perusahaan berdasarkan kebermanfaatannya. Pengklasifikasian indeks didasarkan kategori pemeringkatan, yaitu: sangat terpercaya, terpercaya dan cukup terpercaya. Hasil tersebut dimuat dalam majalah SWA sebagai liputan utama. Selain indeks tersebut CGPI juga menghasilkan laporan riset

pemeringkatan yang bersifat umum dan khusus. Laporan CGPI umum adalah laporan hasil program CGPI yang menyajikan hasil seluruh peserta CGPI dan dipublikasikan secara luas kepada seluruh perusahaan peserta masyarakat, dan *stakeholders* lainnya sebagai bentuk akuntabilitas *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) kepada publik. Laporan CGPI khusus adalah laporan individual bagi perusahaan peserta CGPI yang menyajikan hasil CGPI untuk setiap peserta CGPI sebagai akuntabilitas IICG kepada peserta CGPI untuk dijadikan salah satu bahan perbaikan dan peningkatan kualitas CG di lingkungan perusahaannya (www.iicg.org).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai struktur kepemilikan dan penerapan tata kelola perusahaan terhadap kualitas laba sebenarnya telah banyak diteliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang mengombinasikan antara kepemilikan saham terkonsentrasi di suatu negara, penggunaan indeks pengukuran terpercaya dalam penerapan *corporate governance* perusahaan sebagai pemediasi dengan mempertimbangkan pengukuran multidimensional terhadap kualitas laba, belum banyak dilakukan.

Dalam hal ini beberapa jurnal dan penelitian ilmiah dikutip untuk dijadikan sebagai referensi dan sumber penelitian guna memperoleh hasil analisis yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Carolina dan Wardhani (2011) kualitas laba suatu perusahaan dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan dengan mempertimbangkan lingkup penelitian antar negara seperti Indonesia, Singapura, HongKong dan Australia. Mereka menerapkan pengukuran kualitas laba berdasarkan standar yang ditetapkan oleh *International Financial Reporting Standards* (IFRS) terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan konsep harmonisasi akuntansi. Tingkat pengungkapan laporan keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di suatu negara.

Menurut Surifah (2010) suatu penelitian terhadap kualitas laba harus menggunakan berbagai macam pengukuran karena tingkatan kualitas suatu laba mencakup berbagai aspek (*multidimensional*). Suatu laba dikatakan berkualitas apabila laba tersebut relevan dan handal (*reliable*). Surifah (2010) melanjutkan kualitas laba dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik dan tepat waktu. Dikatakan handal apabila laba dilaporkan secara independen, netral, dapat diverifikasi (*verification*) dan disajikan secara jujur. Selain daripada itu kualitas laba dapat diukur dengan adanya persistensi, konservatif, tidak adanya manajemen laba, kualitas akrual dan *income smoothings* atau *low earnings variability*. Berdasarkan penelitian tersebut dan mengacu pada standar keberkualitatan suatu laporan keuangan menurut SFAC No. 2 mengenai karakteristik kualitatif informasi keuangan, maka penelitian di atas akan memperkuat penggunaan pengukuran multidimensional yang dilakukan dalam penelitian ini.

Menurut Wardhani (2009) penerapan tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh adanya perlakuan perlindungan para investor dan kualitas audit di suatu negara, sedangkan penerapan tata kelola perusahaan sendiri mempengaruhi peningkatan kualitas laba di negara yang lemah perlindungan terhadap investornya. Dalam penelitiannya ditemukan tidak signifikan penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) pada hubungannya antara kualitas audit dan kualitas laba.

Menurut Siallagan dan Mas'ud (2006) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba, lain halnya dengan dewan komisiner suatu perusahaan yang memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba. Komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laba karena kemampuannya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Mereka menyebutkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan tidak di-*intervening* oleh kualitas laba.

Menurut Hadiprajitno (2013) efek karakteristik kepemilikan dan penerapan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh yang beragam. Dimana kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi keuangan, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap biaya keagenan yang diprosikan sebagai biaya operasional manajerial dan *asset turnover* dibanding dengan kepemilikan publik. Lebih lanjut disebutkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi (sebesar 5% kepemilikan) tidak terbukti mempengaruhi biaya keagenan. Dalam penelitian yang dilakukan Hadiprajitno (2013) disebutkan terjadi ketidak-konsistenan antara komite independen dan komite audit yang

disebabkan karena penerapan mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia yang masih kurang baik.

Tabel 2.2. Ringkasan Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Carolina dan Wardhani (2011)	<p>Kualitas laba suatu perusahaan dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengungkapan (<i>disclosure</i>) laporan keuangan.</p> <p>Tingkat pengungkapan laporan keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di suatu negara dengan menerapkan pengukuran kualitas laba berdasarkan perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan konsep harmonisasi akuntansi.</p>
2	Surifah (2010)	<p>Kualitas laba harus menggunakan berbagai macam pengukuran karena tingkat keberkualitasan suatu laba mencakup berbagai aspek (<i>multidimensional</i>).</p> <p>Kualitas laba dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi dan dikatakan handal apabila laba dilaporkan secara netral.</p>
3	Wardhani (2009)	<p>Dalam penelitiannya ditemukan tidak signifikan penerapan tata kelola perusahaan (<i>corporate governance</i>) pada hubungannya antara kualitas audit dan kualitas laba</p>
4	Siallagan dan Mas'ud (2006)	<p>Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba.</p> <p>Dewan komisioner memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba. Komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laba karena kemampuannya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Penerapan tata kelola perusahaan tidak di-<i>intervening</i> oleh kualitas laba</p>

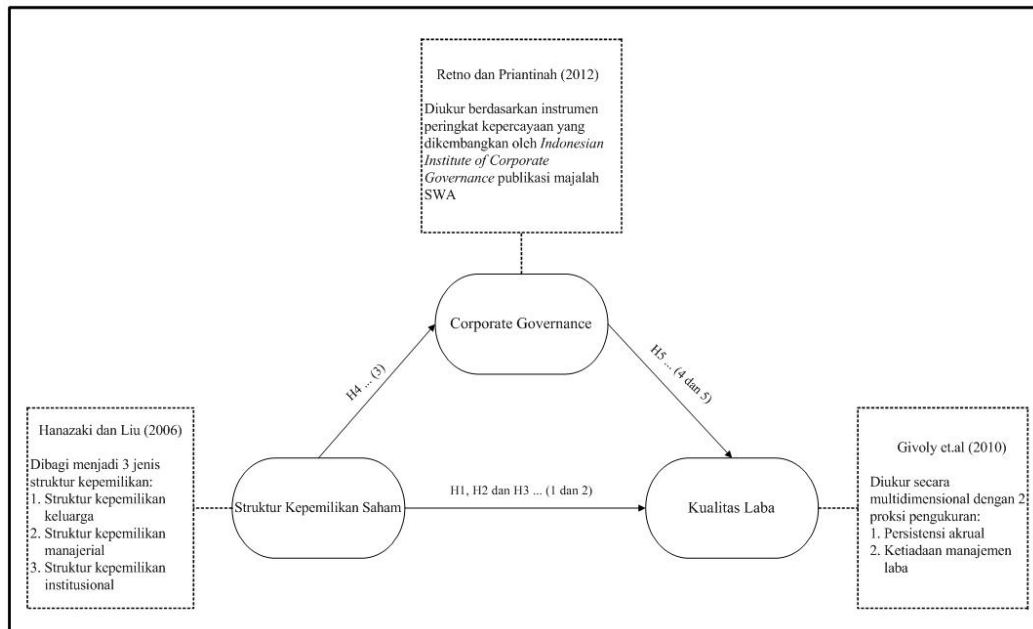
5	Hadiprajitno (2013)	<p>Kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi keuangan, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap biaya keagenan.</p> <p>Kepemilikan terkonsentrasi (sebesar 5% kepemilikan) tidak terbukti mempengaruhi biaya keagenan.</p> <p>Terjadi ketidak-konsistenan antara komite independen dan komite audit yang disebabkan karena penerapan mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia yang masih kurang baik</p>
---	---------------------	--

Sumber: Tinjauan yang dikembangkan untuk penelitian ini.

2.1.6 Model Penelitian

Secara skematis gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dituangkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Hipotesis



Sumber: Model yang dikembangkan untuk penelitian ini.

2.1.7 Pengembangan Hipotesis

2.1.7.1. Kepemilikan Manajerial dengan Kualitas Laba

Kepemilikan manajerial suatu perusahaan dapat diketahui dari persentase kepemilikan saham oleh manajemen. Para manajemen yaitu dewan komisaris dan dewan direksi yang turut andil memiliki perusahaan dan juga aktif dalam mengelola perusahaan. Secara teoritis ketika para manajer juga pemilik perusahaan maka terjadi kesamaan kepentingan, yaitu kepentingan manajer dengan kepentingan perusahaan (pemilik saham). Sehingga para manajer tersebut sedemikian hingga akan termotivasi untuk melaporkan laba perusahaan dengan sebenarnya. Akibat hal tersebut kualitas laba perusahaan yang dilaporkan akan meningkat. Pemikiran tersebut selaras dengan Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa dalam meminimalkan konflik keagenan, perusahaan dapat meningkatkan porsi kepemilikan manajerialnya sehingga diasumsikan konflik keagenan akan hilang apabila seorang manajer juga seorang pemegang saham.

Bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Mas'ud (2006) menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar persentase kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan manajemen untuk meningkatkan kinerja mereka yang berpengaruh pada kehandalan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H1: Persentase kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan.

2.1.7.2. Kepemilikan Institusional dengan Kualitas Laba

Penyertaan pihak institusional dalam saham perusahaan dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pihak institusional secara fidusiari dapat mengendalikan pihak manajemen melalui *monitoring* efektif, sehingga kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba berkurang. Pemikiran ini sejalan dengan Shleifer dan Vishny (1986) dalam Isnanta (2008) yang menyatakan kepemilikan saham yang besar nilai ekonomisnya memiliki insentif yang lebih besar pula untuk melakukan *monitoring*. Kondisi pemantauan yang aktif ini dapat menyebabkan berkurangnya kegiatan oportunistik manajemen yang berimbas pada meningkatnya kualitas laba yang disajikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Mas'ud (2003) memberikan simpulan bahwa persentase kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H2 : Persentase kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan.

2.1.7.3. Kepemilikan Keluarga dengan Kualitas Laba

Timbulnya kecenderungan memberikan individu-individu yang memiliki hubungan keluarga sebagai direksi perusahaan sehingga direksi cenderung untuk bersifat tidak independen, menyebabkan perusahaan tidak memiliki bagian manajer yang tidak berafiliasi secara proporsional sehingga perusahaan sepenuhnya berada dalam kendali keluarga. Persentase kepemilikan yang

berlebihan pada keluarga akan sangat mempengaruhi kualitas laba terutama apabila perusahaan tersebut sudah terbuka (*go public*).

Keadaan seperti ini banyak sekali terjadi terutama pada negara-negara yang perlindungan pemegang sahamnya rendah. Indonesia sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Claessens *et al.* (2000) dan La Porta *et al.* (1999) memiliki perusahaan yang mayoritas dikendalikan oleh keluarga. Pengendalian keluarga yang terlalu besar dalam suatu perusahaan ini mengakibatkan manajemen tidak lagi termotivasi untuk memberikan informasi keuangan yang sebenarnya kepada publik, mereka hanya termotivasi untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga kepemilikan keluarga tidak dapat memberikan informasi yang berkualitas pada laporan keuangan perusahaan mereka. Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis selanjutnya berupa:

H3 : Persentase kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kualitas laba perusahaan.

2.1.7.4. Struktur Kepemilikan dengan *Corporate Governance*

Menurut Durnev dan Kim (2003) kepemilikan saham suatu perusahaan mempengaruhi tingkat kualitas penerapan *corporate governance*-nya. Secara teoritis mekanisme *corporate governance* bergantung pada struktur kepemilikan perusahaannya dan secara nyata dapat diketahui bahwa struktur kepemilikan mengendalikan sepenuhnya penerapan mekanisme *corporate governance*. Ikut serta atau tidaknya perusahaan dalam mekanisme tersebut juga dipengaruhi oleh keputusan dari pemilik perusahaan.

Demsetz *et al.* (1985) mengatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan harus diperhatikan sebagai faktor endogen dari keluarnya suatu kebijakan dan keputusan yang merefleksikan pengaruh struktur kepemilikan dan pengaruh aktivitas pasar saham. Ketika kepemilikan saham perusahaan terpusat (*concentrated*) yaitu persentase mayoritas saham berada pada suatu jenis kepemilikan golongan tertentu, dapat dikatakan bahwa semakin mudah pemilik perusahaan tersebut untuk mengendalikan kinerja manajer agar selaras dengan rasional ekonomis diantara golongan mereka. Oleh karena itu dapat diajukan hipotesis selanjutnya berupa:

H4: Persentase kepemilikan saham (terkonsentrasi) berpengaruh positif terhadap *Corporate Governance*.

2.1.7.5. *Corporate Governance* dengan Kualitas Laba

Berkembangnya kesadaran masyarakat akan dibutuhkannya mekanisme yang dapat mengendalikan perusahaan agar operasionalnya dapat sesuai dengan harapan mereka, menjadikan penerapan *corporate governance* di Indonesia sebuah kewajiban bahkan kebutuhan demi tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan dihimbau untuk melakukan etika dalam berusaha dengan tidak melakukan berbagai kecurangan-kecurangan yang akan berimbas pada kualitas informasi yang mereka laporkan.

Beberapa penelitian yang meneliti tentang implementasi *corporate governance* dengan berbagai bentuk pengukuran laba, seperti Beasley (1996), Dechow *et al.* (1996) dan Siregar (2005) menyimpulkan bahwa dengan penerapan *corporate*

governance mampu mengurangi kecenderungan para manajer untuk melakukan kecurangan informasi laba, sehingga kualitas laba memiliki kandungan informasi yang lebih baik bagi para investor. Dengan demikian dalam penelitian ini mengajukan hipotesis berupa:

H5: Penerapan *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laba.